

Arah dan Perkembangan Studi Implementasi: Konfigurasi Kapital Sosial-Governance dan Inovasi

Assoc. Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si

Assalamua'laikum warohmatullohiwabarokatuh
Tabik pun.....

Yang terhormat Rektor dan para Wakil Rektor serta Senat Universitas Lampung
Yang terhormat Dekan dan para Wakil Dekan serta Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Yang terhormat Para Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Laboratorium di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Yang terhormat teman sejawat, tenaga pendidikan, para mahasiswa
Yang terhormat tamu undangan, dan hadirin sekalian yang berbahagia.

PENDAHULUAN

Penyampaian orasi ilmiah kami hari ini bermaksud untuk menguraikan ***mengapa lebih banyak kebijakan yang gagal diimplementasikan ketimbang berhasil?***. Berbagai fenomena implementasi kebijakan menunjukkan 3 kecenderungan. ***Pertama***, ada kebijakan nasional yang berasal dari kementerian yang sama ketika diimplementasikan menunjukkan variasi hasil yang berbeda; ***kedua***, beberapa jenis kebijakan tertentu lebih mudah berhasil di masa kepemimpinan organisasi tertentu dibanding dengan masa yang lain dan ***ketiga***, cukup menggelitik kami sampai hari ini, adalah kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik, bahkan melalui proses ruang deliberasi (musyawarah), kemudian justru kembali gagal dalam implementasinya. Selanjutnya uraian itu akan direfleksikan dalam factor-faktor penjelas, yaitu konfigurasi kapital sosial- governance dan Inovasi. Hasilnya menunjukkan bagaimana konfigurasi kapital sosial-governance dapat membangun sebuah hubungan *mutual exclusive*, tidak boleh saling meniadakan. Peran penting Inovasi bertindak merespon tantangan-tantangan baru dengan pengubah permainan, menerobos ketergantungan jalan yang tidak hanya terkait dengan inovasi yang didorong oleh sains dan teknologi, sebaliknya penting untuk melihat melampaui inovasi teknologi yaitu inovasi nilai .

PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian

Implementasi kebijakan sejak lama dipercayai oleh penganut aliran dikotomi politik administrasi diasumsikan sebagai tahapan yang paling mudah untuk dilakukan, tahapan yang paling sulit adalah merumuskan kebijakan (Ripley dan Franklin, 1986). Realitas baik kondisi normal, era pandemic dan era PPKM, ternyata menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang sebelumnya dianggap hanya sebagai urusan tehnis, ternyata penuh dengan

onak dan duri, sulit hasilnya tidak terduga bahkan terkadang memunculkan korban dan konflik yang berkepanjangan (Hupe et al., 2014). Sebut saja di awal pandemic sampai PPKM, masih terjadi carut marut komunikasi public, kegagalan masyarakat menangkap pesan dan informasi akurat, lemahnya data. Tidak jelasnya pesan kebijakan diperparah dengan miskinnya koordinasi antar lini pemerintahan bahkan terjadi pertengkaran, pengusiran terutama di daerah serta tidak nampaknya sinergitas sebagai unsur penting pengelolaan krisis, ketersediaan sumber daya dan infrastruktur (vaksin, oksigen, obat-obatan dan alat-alat pokok kesehatan lainnya) yang bisa digerakkan untuk menangani situasi krisis sampai dengan hari ini, terakhir terjadinya korupsi dan manipulasi. Jika hal ini kita bawa ke perguruan tinggi maka kita akan menemukan juga beberapa realitas implementasi berupa kualitas proses dan hasil pembelajaran yang dirasakan kurang memuaskan stakeholders, ketidaksiapan sumberdaya dan infrastruktur kampus, kendala proses pembelajaran daring, kesiapan teknologi dan anggaran.

Beberapa argumen telah mengkritik implementasi yang hanya dipahami sebagai “*eksekusi*” kebijakan yang sudah ada. Proses implementasi yang demikian itu secara garis besar hanya menekankan pada tujuan yang dicapai, sedangkan bagaimana mekanisme pencapaian tujuan tersebut yang terjadi dalam “*kelompok sasaran tertentu dan terpilih*” terkadang kurang mendapat perhatian (Torenviled dan Thomson, 2003).

Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian

Realitas implementasi kebijakan sebagaimana paparan di atas, tentunya menimbulkan keprihatinan kita semua. Kegagalan implementasi bukan saja berkaitan dengan kerugian berupa finansial yang harus di tanggung pihak lain, kelompok sasaran, masyarakat luas. Namun kegagalan juga berarti hilangnya kesempatan (*lost of opportunity*). Purwanto dan Sulistyastuti (2012), menggambarkan realitas keterbatasan anggaran (*budget constraint*), maka setiap pilihan kebijakan mengakibatkan pertukaran (*trade off*) yang mengandung dilemma yang harus dipilih karena keterbatasan. Sebagai bentuk keprihatinan maka perlu upaya dan kerja keras bersama untuk melakukan revitalisasi dalam membangun arah studi implementasi masa depan. *Berbagai upaya untuk memahami dan mendefinisikan apa sebenarnya implementasi itu secara jelas termasuk mengidentifikasi siapa sesungguhnya implementor dan apa peran mereka dalam implementasi menjadi penting.*

Perubahan dan perjalanan pemaknaan implementasi kebijakan telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan studi implementasi.

GENERASI I, merupakan generasi yang menggunakan *case study* kegagalan-kegagalan implementasi, dengan tokohnya Pressman dan Wildavsky sebagai pelopor benar telah meletakkan implementasi kebijakan pada paradigma *politik-administrasi*, dengan kata kunci utama manajemen, *hanya menjalankan kebijakan (to carry out)*, memenuhi janji dan target-target dalam dokumen kebijakan.

GENERASI II, merupakan generasi *building model*. Meletakkan dan membangun 2 model pendekatan yang bertolak belakang, yaitu top-down dan bottom up. Keduanya menempatkan peran implementer, posisi stakeholders pada kondisi hipotetical yang berbeda. Pendekatan top down yang kerap disebut policy centered sangat dirasakan begitu kuat, mengakar dan praktek-praktek penggunaan telah menyebar luas sampai dengan hari ini. Pendekatan top-down dalam penerapannya telah berusaha memusatkan perhatian

pada kebijakan sembari memperoleh fakta-fakta, apakah kebijakan ketika diimplementasikan mampu mencapai tujuan atau tidak (Hogwood and Gunn, 1984; Sabatier, 1986). Cara kerjanya yang meliputi common and control, menyederhanakan masalah, cenderung instrumentalis dianggap beberapa ahli sebagai pendekatan "*pesimis*", dengan para pendukungnya antara lain Nakamura dan Smallwood (1980), Edward III (1980), Grindle (1980). Kritik-kritik dilancarkan oleh peneliti yang kritis yang berusaha mengganti dengan pendekatan yang berbeda (yaitu bottom up), diantaranya: Hjern and Hull (1982), Hanf (1982), Barrett and Fudge (1981), Elmore (1979). Mereka menunjukkan terjadi 4 kelemahan mendasar dalam praktek top-down, yaitu: **pertama**, menganggap actor utama (implementer) yang paling berpengaruh adalah para policy maker; **kedua** pendekatan ini terasa sulit diterapkan pada saat didapati tidak ada kebijakan dan actor dominan; **ketiga** melupakan kenyataan birokrasi (petugas/pelaksana) garda depan bahkan kelompok sasaran dapat dan memiliki kecenderungan menyelewengkan arah kebijakan bagi kepentingan masing-masing; **keempat**, siklus kebijakan tidak selalu bersifat clear-cut, sehingga menjadi ruang birokrasi garda depan dan kelompok sasaran negosiasi saat penyusunan kebijakan dan berlanjut sampai pelaksanaan kebijakan.

Pendekatan bottom up beramai-ramai dianggap sebagai pendekatan solusi untuk keluar dari masalah. Pendekatan Bottom up dipelopori oleh Elmore (1979), Lipsky (1971), Berman (1978) dan Hjern, Hanf serta Porter (1978). Para pengikut menekankan pentingnya 2 aspek dalam implementasi, yaitu birokrat pada level bawah (*street level bureaucrat*) dan kelompok sasaran (*target group*). Beberapa langkah yang disarankan: **pertama**, memetakan stakeholders (actor dan organisasi) yang terlibat dalam implementasi kebijakan pada level terbawah; **kedua**, mencari informasi dari para actor tentang pemahaman mereka terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dan pada kepentingan mereka terlibat dalam implementasi; **ketiga**, memetakan keterkaitan jaringan para actor pada level terbawah dan level di atasnya.

Generasi III, mencoba menutupi lubang-lubang perangkat kelemahan model implementasi. Mereka sepakat melanjutkan dukungan terhadap pendekatan bottom up yang dirintis generasi II, disamping berusaha mengembangkan studi implementasi ke arah prosedur ilmiah (more scientific approach). Beberapa fokus kajian: **Pertama**, memperjelas konsep implementasi; **kedua**, memperbanyak kasus sehingga memberi ruang yang lebih baik untuk menjelaskan hubungan kausal untuk menjelaskan fenomena implementasi; **ketiga**, membangun model dan indikator untuk menguji hipotesis; **keempat**, melakukan perbaikan terhadap penggunaan konsep dan pengukuran (Googin et al., 1990; Aceituno et al., 2020).

Generasi IV, merespon perkembangan studi implementasi ditengah dinamika yang terjadi pada konstelasi lingkungan sosial, ekonomi dan politik global dalam berbagai aspek. Beberapa teori pada generasi ini telah membawa kecerahan, variasi yang semakin signifikan dalam merespon lingkungan, diantaranya: **Pertama**, *communication theory*, yang dikemukakan Malcolm Goggin et al (1990), telah memadukan sintesis top down-bottom up melalui perbaikan hubungan antara berbagai tingkatan pemerintahan dalam fenomena implementasi; **kedua**, *Regim Theory* yang dipelopori oleh Stocker (1991) melihat implementasi dilaksanakan oleh actor-aktor yang memiliki nilai-nilai yang ingin diwujudkan dalam implementasi dengan berusaha membangun kerangka organisasi. Kemunculan konflik di antara actor tentunya tidak terelakkan, pilihan yang akan dilakukan

adalah **menekan konflik** atau **melepaskan control pihak untuk bekerjasama**, dengan demikian regim pelaksana implementasi tetap berjalan dengan baik; **ketiga**, *Teori kontingensi* dengan pelopornya Lester (1994), memberikan peta jalan keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kombinasi komitmen dan kapasitas pemerintah yang terwujud dalam kondisi progresif, struggler, delayer sampai regressive; **keempat**, *ambiguity conflict model* dengan tokohnya Matland (1995) menggambarkan implementasi akan memunculkan ambiguitas dan konflik diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi, beberapa pilihan implementasi direkomendasikan dengan memperhatikan keduanya, mulai dari administrative implementation, policy implementation, experimental implementation, sampai kepada symbolic implementation. **Kelima** Trust and Involvement Theory yang dipelopori Scheberle (2004) merekomendasikan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat sebagai kelompok sasaran yang menentukan keberhasilan implementasi. *Pulling together* adalah kondisi yang diharapkan untuk keberhasilan implementasi. **Keenam** Policy learning model dengan beberapa tokoh diantaranya Heclo (1974), Etheridge and Short (1983) merespon tuntutan lingkungan eksternal yang cenderung berubah cepat dan fokus juga pada aspek efektivitas kebijakan, yaitu sejauhmana pemerintah/pelaksana belajar dari pengalaman masa lalu (Moyson et al., 2017).

Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian

Dinamika perkembangan implementasi kebijakan tentunya tidak akan pernah usai. Ada beberapa kondisi yang mempengaruhi hal itu diantaranya:

Pertama, implementasi kebijakan merupakan bagian dari ilmu administrasi public, maka tidak bisa dipisahkan dari perkembangan paradigm administrasi public. Administrasi public sebagai governance (tata kelola) pada akhirnya akan mempengaruhi cara pandang keberhasilan maupun kegagalan implementasi (Denhardt dan Denhardt, 2003).

Kedua, Kemunculan era demokrasi yang memberikan ruang keterlibatan public. Pembatasan peran pemerintah (utama) dengan melibatkan berbagai stakeholders dalam konteks implementasi terbaca dalam dua perspektif, yaitu terbukanya peluang keberhasilan implementasi, dimana kelompok sasaran kebijakan akan memiliki pemahaman yang lebih baik, yang berarti juga peluang lebih baik terhadap dukungan kelompok sasaran/terpilih dalam implementasi kebijakan. Disisi lain hal ini juga terbaca dapat menjadi ancaman makin sulitnya implementasi kebijakan, problems koordinasi, monitoring, motivasi/penguatan semakin menguat (Pierre and Peters, 2000).

Ketiga, kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi memberikan dampak dan semakin memperluas variable-variabel determinan implementasi. Teknologi informasi terbukti nyata telah mampu merubah land scape tentang bagaimana organisasi implementer di rancang, relasi hubungan antar actor dan organisasi, posisi kelompok sasaran sampai derajat keterbukaan dan lainnya. Dari sisi implementer, tentunya teknologi informasi memberikan peluang untuk keberhasilan implementasi. Sebut kemudahan dalam koordinasi, pengawasan dan pendataan. Bagi kelompok sasaran/terpilih pun tercipta peluang lebih besar dalam keterlibatan public. Beberapa peluang melalui sosial media misalnya Group-group wa, facebook, Instagram, forum pertemuan online lainnya memungkinkan keterlibatan penuh dan koreksi penyimpangan implementasi sejak dini (Korteland and Bekkers, 2008; Bekkers et al., 2011).

DEMOCRATIC GOVERNANCE: ARAH DAN PERKEMBANGAN STUDI IMPLEMENTASI

Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian

Perkembangan paradigma administrasi public menjadi governance, plus era demokrasi dengan semakin lebarnya ruang keterlibatan public menjadikan *Democratic Governance* saat ini telah menjadi arah sekaligus tantangan baru dalam perkembangan implementasi kebijakan. Seorang ahli bernama Frederickson (1997), memberikan interpretasi hal ini dalam konteks reposisi administrasi public dalam empat terminology, yaitu:

Pertama, *Governance*, menggambarkan networking, desentralisasi. perubahan citra sentralisasi organisasi menuju citra organisasi yang delegatif dan terdesentralisir. Mereka bertemu untuk malakukan perembugan, merekonsiliasi kepentingan sehingga dapat dicapai tujuan secara kolektif atau bersama-sama.

Kedua tempat berhimpunnya berbagai pluralitas pelaku - bahkan disebut sebagai hiper pluralitas - untuk membangun sebuah konser antar pihak-pihak yang berkaitan secara langsung atau tidak (stake holders). Hal penting dalam konteks ini adalah mulai hilangnya fungsi kontrol antar organisasi menjadi, menyebarnya berbagai pusat kekuasaan pada berbagai pluralitas pelaku, dan makin berdayanya pusat-pusat pengambilan keputusan yang makin mandiri.

Ketiga, *Governance* dalam konteks administrasi publik kental dengan sistem nilai-nilai *kepublikan*. *Governance* menyiratkan sesuatu hal yang sangat penting. *Governance* menyiratkan sesuatu keabsahan. *Governance* menyiratkan sesuatu yang lebih bermartabat, sesuatu yang positif untuk mencapai tujuan publik ketimbang terminologi pemerintah (*government*) dan birokrasi direndahkan, disepelekan mencerminkan sesuatu yang lamban kurang kreatif.

Keempat, *Governance* berpautan dengan kecenderungan kekinian dalam literatur-literatur manajemen publik utamanya spesialisasi dalam rumpun kebijakan publik, dimana relasi multi organisasional antar aktor-aktor kunci terlibat dalam implementasi kebijakan. Kerjasama para aktor yang lebih berwatak politik, kebersamaan untuk memungut resiko, lebih kreatif dan berdaya, tidak mencerminkan watak yang kaku utamanya menyangkut : organisasi, hirarki, tata aturan.

Dari keempat terminology tersebut maka dapatlah kita tarik pokok pikiran bahwa *demokratik governance* dalam konteks implementasi kebijakan adalah proses implementasi untuk mencapai tujuan-tujuan publik yang dilakukan oleh *aktor* : pluralitas organisasi, dengan *sifat hubungan* yang lebih luwes dalam tataran vertikal dan horisontal, disemangati oleh nilai-nilai kepublikan antara lain keabsahan, responsif, kreatif. Dilakukan dalam *semangat* kesetaraan dan *netwoking* yang kuat untuk mencapai tujuan publik yang akuntabel.

Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian

Interpretasi demokratik governance sebagai arah dan tantangan baru dalam implementasi kebijakan sangatlah relevan jika kita bedah dengan menggunakan perspektif strukturalis

sebagaimana argumentasi Frederickson (2000), O'Toole (2000) melalui aras teori kelembagaan (*institutionalism*) dan teori jaringan (*network theory*).

Pertama, Para aras kelembagaan. Implementasi berkaitan dengan level kelembagaan (*institutional level*) dan fokus pada tataran-tataran sistem nilai (*value*). Matra ini meliputi **sistem nilai**, peraturan-peraturan formal atau informal dengan tingkat pelebagaan yang mantap : bagaimana hirarki ditata, sejauhmana batas-batasnya disepakati, bagaimana prosedurnya, apa nilai-nilai kolektif yang dianut rejim. Yang termasuk dalam konsepsi ini antara lain : hukum administrasi, dan bentuk peraturan legal lainnya, teori-teori yang berkaitan dengan bekerjanya birokrasi dalam skala luas, teori politik ekonomi, teori kontrol politik terhadap birokrasi. Pada gatra ini terdapat sejumlah teori yang sangat penting : teori kelembagaan (*institutional theory*), teori perburuan rente (*rent seeking*), teori kontrol dari birokrasi, dan dan teori tujuan dan filosofi pemerintah.

Kedua, implementasi pada level organisasi dan managerial. Biasanya akan berpautan dengan biro-biro hirarki, departemen, komisi dan agen-agen pemerintah atau juga organisasi-organisasi yang menjalin hubungan kerja dengan pemerintah. peran implementasi adalah **mengakselerasikan** kepentingan-kepentingan publik (*public interest*) dalam suatu **network** antar institusi . Pada tataran ini agenda-agenda : kebebasan dan mandirian administratif, takaran-takaran unjuk kerja dalam proses pelayanan publik, menjadi isu yang penting. Tori-teori yang signifikan untuk menjelaskan fenomena ini antara lain : principal-agent theory, transaction cost analysis theory, collective action theory, network theory.

Ketiga, implementasi pada level teknis. Adalah bagaimana nilai-nilai dan kepentingan publik sebagaimana telah dikemukakan pada pendekatan pertama dan kedua harus **dioperasionalisasikan** dalam tindakan-tindakan riil. Teknologi, khusus teknologi informasi menjadi relevan pada tahap ini. Isu-isu tentang profesionalisme, standar kompetensi teknis, akuntabilitas, dan kinerja (*performance*) sangat penting dalam konteks ini. Teori-teori yang relevan untuk tema ini antara lain : ukuran-ukuran efesiensi, teknis manajemen budaya organisasi, kepemimpinan, mekanisme akuntabilitas, dan ukuran. Dengan demikian pada level ini governance lebih banyak berurusan dengan implementasi kebijakan publik pada level operasional (*public policy at the street level*).

Perspektif strukturalis dirasakan dapat membimbing arah baru perkembangan studi implementasi kearah konteks **lingkungan** sosial ekonomi politik yang penuh dengan dinamika. Implementer yang semula menjadi pusat kebijakan telah berubah hanya menjadi "salah satu" dari sejumlah pluralitas organisasi dan institusi kebijakan yang menjalin networking secara kolektif. Oleh karena itu, kehadirannya tentunya harus terbangun dari berbagai sistem nilai dan norma yang dibawa pada tataran supra organisasi, inter organisasi dan antar organisasi.

Dalam konteks ini, maka peran implementasi kebijakan tentunya wajar dan akan menjadi sarat dengan ikatan-ikatan sistem nilai yang tersedia dalam deposit sistem sosialnya. Implementer dalam konteks ini tentu akan menjadi tidak netral dengan berbagai realitas yang berkembang di ekologiinya. Sistem nilai dapat saja berupa nilai-nilai formal yang dikonstruksi oleh pranata-pranata hirarkis dan rasional tapi juga dapat dipengaruhi oleh

berbagai varian sistem nilai yang oleh Francis Fukuyama (1999) dikatakan sebagai “order sosial”, demikian juga dibangun secara spontan dan arasional oleh publik. Nilai-nilai spontan arasional yang merupakan salah satu elemen kapital sosial inilah yang menyebabkan, sebuah institusi berkembang lebih cepat dibanding yang lain. Karenanya, arah dan perkembangan baru studi implementasi telah memasuki sebuah pemahaman dan kesadaran baru, bahwa ciri utama interaksi proses implementasi tidak hanya ditentukan oleh order yang bersifat publik, formal, dan bercorak legal tetapi lebih dari itu juga ditentukan oleh peran-peran yang sifatnya dapat dinegosiasikan (negotiable), bersifat labil, kontur-kontur yang bersifat sangat privat, yang disebut sebagai nilai-nilai informal (Seligman, 1998).

Kami ingin menegaskan kembali, bahwa studi implementasi telah memasuki lingkungan ekologi sosial baru yang sarat dengan sistem nilai, misalnya saja budaya, politik, informasi, komunikasi. Nilai-nilai formal yang direproduksi secara hirarkis dan rasional memang turut membangun watak arah baru, tetapi aspek yang terpenting dari perubahan adalah idiom-idiom dan kuadran nilai spontan dan arasional yang menjadi modal sosial sebuah masyarakat, atau komunitas target sasaran/ terpilih. Peran kapital sosial menjadi sangat penting dan lebih substantif. Citra keberhasilan dan kinerja implementasi kebijakan akan ditentukan bagaimana energi sosial yang dibangun secara otonom, kolaboratif dan genuinely dari penerima kebijakan. Dalam konteks inilah implementer perlu melakukan deformasi watak dan etikanya .

KONFIGURASI KAPITAL SOSIAL DAN GOVERNANCE

Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian

Bagaimana sesungguhnya interaksi dan kedudukan konsep-konsep kapital sosial dan governance dalam konfigurasi perubahan studi implementasi menjadi analisis dan pembahasan penting berkaitan arah dan perubahan baru studi implementasi pada hari ini.

Kapital sosial bukanlah makna dan dikotomi lokus yang berbeda, yaitu kapital sosial yang berasal dari domain deposit publik dalam arti mengecualikan elemen-elemen pemerintah dan kapital sosial yang berasal dari publik dalam arti yang luas. Kapital sosial dalam konteks analisis ini adalah yang berasal domain publik dalam arti luas. Argumentasinya, kapital sosial adalah kekayaan nilai yang domainnya di entitas publik dengan berbagai varian. Varian-varian kapital sosial ini dapat saja menjadi elemen pembangun nilai-nilai dari segregasi-segregasi entitas yang diciptakan oleh masyarakat. Negara atau pemerintah adalah salah satu bentuk entitas publik, yang didalamnya bisa saja menolak atau mengenakan kapital sosial yang ada pada entitas-entitas diluarnya (Duadji dan Tresiana, 2020).

Seorang ahli, bernama Fukuyama (1999) memberikan batasan kapital sosial adalah adalah : "...a set of informal values or norms shared among members of a group that permits cooperation among them...". Akar teoritik adalah kepercayaan. Hingga Fukuyama (1996) sampai pada suatu kesimpulan bahwa "... social capital is a capability that arises from the prevalence of trust in a society or in certain parts of it...". Kepercayaan (trust) adalah salah

satu visualisasi dari adanya kekokohan kolektif untuk memegang norma sosial untuk bekerjasama.

Melalui bukunya yang berjudul *Trust : The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, Francis Fukuyama (1996) melukiskan dalam berbagai contoh bagaimana sumber-sumber deposit kapital sosial antara lain norma-norma agama, ikatan-ikatan komunal dan **kesukuan** yang dalam kurun tertentu telah memberikan landasan istimewa untuk menjamin saling percaya. Hal ini realitanya bukan saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di perguruan tinggi.

Penjelasan dari statemen itu, adalah masyarakat, komunitas target sasaran yang mempunyai kapital sosial kepercayaan yang tinggi, maka dalam berbagai urusan bisnis, politik, dan birokrasi tak banyak memerlukan kehadiran norma-norma publik yang lebih formal. Sehingga proses negosiasi dan transaksi sosial yang dilakukan dapat dengan mudah dilakukan tanpa jaminan dan tan tanpa imbalan resorsis, mereka lebih mengandalkan norma-norma resiprositas atau pertukaran (Brown & Livermore, 2019). Inilah yang oleh dikatakan seorang ahli Margaret Levi (1999) bahwa kepercayaan (*trust*) itu mempunyai fungsi sangat signifikan untuk mereduksi biaya-biaya ekonomi dan biaya sosial yang harus dibayar oleh pihak yang berinteraksi. Dengan kepercayaan maka para aktor sosial yang berinteraksi tidak harus mengandalkan pranata-pranata formal yang acapkali memerlukan proses dan prosedur yang sangat tidak efisien.

Kami mencoba mengaitkan pemikiran-pemikiran di atas pada bidang manajemen dan politik, maka pada bidang manajemen, teori kapital sosial tentu akan mengkritik tipe manajemen yang dikembangkan oleh salah tokohnya yaitu Taylor, yang sarat dengan jenjang hirarki. Perubahan organisasi menjadi struktur datar (*flat*) telah menyebabkan para pegawai lebih dekat dengan berbagai resorsis lokal sehingga terdorong secara otomatis untuk berprakarsa mengambil keputusan-keputusan penting secara mandiri tanpa tergantung dari atasannya yang mungkin jauh dari jangkauannya. Sehingga dalam praktek manajemen demikian lebih efisien (Howlett, 2018). Demikian juga bidang politik, rendahnya kapital sosial dalam negara demokrasi dapat berakibat buruk pada proses demokrasi. Demokrasi mensyaratkan kedewasaan masyarakat untuk mampu mengorganisir dirinya dan menata model-model interaksi politik didalamnya. Masyarakat demokratis tanpa kekukuhan kapital sosial akan menciptakan pertentangan-pertentangan dan anarkisme (Dahl, 1998).

Fukuyama (1999) melalui studi pengamatan di beberapa negara Amerika Latin, mempertegas bahwa renggangnya kepercayaan antar masyarakat melahirkan dualisme sikap sebagian besar politisi dan birokrat di negara-negara itu. Sikap pertama, munculnya integritas perilaku yang baik dengan anggota keluarga dan teman-teman terbatas sedang dipihak lain melahirkan perilaku-perilaku dalam ruang publik yang lebih luas. Sehingga fenomena ini menjadi landasan meluasnya korupsi.

Pengamatan sejenis berikut ini menggambarkan perbandingan institusi di Amerika dan Jepang. Diantara kelembagaan publik paling utama yang menentukan kemajuan

industrialisasi di Jepang adalah adanya gugus perencanaan industrialisasi nasional yang disebut MITI (*Ministry of International Trade and Industry*). Lembaga ini berfungsi secara proaktif merencanakan jenis-jenis industri yang akan dipertandingkan dalam pasar internasional. Lembaga ini juga mempunyai otonomi penuh memberikan lisensi kredit dan pasokan modal kepada unit-unit industri yang mempunyai kompetensi teknis dan skill memadai. Amerika dan beberapa negara Afrika dan Amerika Latin telah mencoba mentranfer institusi ini kedalam negaranya, tetapi tak satupun dapat menandingi kehebatan peran MITI. Penelitian dan testimoii yang dilakukan secara luas menemukan, ada beberapa karakter kultural bangsa Jepang yang tidak dapat ditemukan dinegara lain yaitu : *tingginya integritas para birokrat, tingginya level keterampilan dan profesionalisme, dan terakhir yaitu kuatnya penghormatan kepada otoritas yang lebih tua dalam masyarakat Jepang*. Kehadiran kelompok-kelompok muda, tidak harus mengurangi penghormatan terhadap hal ini. Nilai-nilai inilah yang tidak dapat ditransfer ke tempat lain.

Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian

Selanjutnya, bagaimana sebenarnya peran kapital sosial dalam arah dan perubahan baru implementasi kebijakan dalam kerangka kualitas keberhasilan implementasi yang masih didominasi pemerintah?

Beberapa penelitian terhadap dilakukan ahli untuk menjawab hal itu. Penelitian La. Porta (1997) menetapkan sampel 30 negara di dunia, menyimpulkan masyarakat dengan derajat kepercayaan yang tinggi signifikan dengan membaiknya unjuk kerja pemerintah. Variabel yang diperbandingkan adalah keyakinan publik pada pemerintah dan efesiensi birokrasi yang ditunjukkan oleh pemerintah. Penelitian Robert Putnam (1993) di Italia, menemukan bahwa pemerintahan-pemerintahan regional yang mengantongi kepercayaan publik lebih (*more trusting*) dan lebih berwatak kewargaan (*more civic minded*) lebih mampu menyediakan layanan-layanan publik lebih efektif dibanding tempat lain yang sifat-sifat kepercayaan dan karakter kewargaanya lebih rendah

Knack (2000), mengatakan ada tiga cara kapital sosial memperbaiki kualitas implementasi pemerintahan: ***Pertama***, pemerintah dapat memperluas jangkauan akuntabilitasnya karena responsif pada kepentingan rakyat lebih luas dibanding dengan kepentingan-kepentingan kelompok yang lebih kecil. ***Kedua***, dapat memfasilitasi kesepakatan-kesepakatan tatkala terjadi polarisasi kepentingan politik terjadi. ***Ketiga***, memperbesar kapasitas inovasi dalam proses pengambilan keputusan ketika berhadapan dengan tantangan-tantangan baru.

Dari beberapa hasil penelitian dan gagasan, maka dapatlah ditarik aspek penting yang menentukan kualitas keberhasilan implementasi adalah sejauhmana kiprah dan kinerja yang dilakukan implementer dalam merefleksikan kontur sistem nilai yang berlangsung di ceruk entitasnya. Kecerdasan aktor-aktor termasuk didalamnya pemerintah, birokrat dan pejabat publik lainnya dalam memungut nilai-nilai ini, kemudian menginkorporasikannya dalam proses tata kelola implementasi adalah merupakan investasi penting. Persoalan nilai (*value sistem*) menjadi bagian sentral, adanya kepercayaan dari publik yang besar,

sikap integritas dan komitmen yang kuat dari para implementer akan pentingnya "civic minded" secara iteratif dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Kontrol yang kuat dari publik sebagai bagian perasaan ikut mengambil peran besar dalam kesuksesan implementasi akan mampu mengurangi perburuan rente politik yang dilakukan oleh para birokrat (Stanica & Olaru, 2017). Dalam hal ini, memperluas kapasitas Inovasi tentunya menjadi agenda penting yang tidak bisa dipisahkan untuk konfigurasi perubahan studi implementasi

INOVASI

Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian

Memperluas kapasitas Inovasi, salah satunya melalui pengambilan keputusan ketika berhadapan dengan tantangan-tantangan baru dalam proses implementasi menjadi bagian tak terpisahkan dalam membangun konfigurasi kapital sosial dan governance.

Untuk Implementasi kebijakan sektor publik, inovasi memastikan bentuknya bukan hanya berbasis efisiensi, melainkan mewujudkan nilai dan manfaat publik misalnya perihal keadilan. Secara umum diketahui, inovasi dipengaruhi oleh dua logika.

Pertama, inovasi dapat dinilai dari perspektif konsekuensi yang diakibatkan serta preferensi dan harapan yang mendahuluinya. March dan Olsen (1998) menyebut sebagai "*logika konsekuensi*". Harus ada konsekuensi relevan dan mungkin memiliki nilai substantif dalam hal produktivitas dan hasil yang ingin dicapai, sehingga terdapat hasil inovasi yang dapat dirasakan oleh kelompok sasaran tertentu. Hal lainnya, misalnya, inovasi dapat menghasilkan penggunaan sumberdaya implementer oleh pemerintah dengan lebih efisien.

Kedua, inovasi di sektor publik dapat pula merujuk pada "logika kesesuaian". Logika ini mempertimbangkan kesesuaian inovasi dengan pelaksanaan peran pemerintah (March & Olsen, 1998).

Untuk ketercapaian hal itu, maka empat implikasi harus dipertimbangkan. **Implikasi Pertama**, inovasi harus sah dan berkelanjutan secara politik, misalnya mampu menarik dukungan, otoritas, dan biaya secara terus-menerus dari lembaga yang berwenang. **Implikasi Kedua**, inovasi publik merujuk pada berbagai nilai demokrasi yang dianggap penting oleh warga. Sebuah inovasi dapat mengarah pada peningkatan akses masyarakat, partisipasi dan pemberdayaan, transparansi, akuntabilitas, maupun kesetaraan (Bason, 2010). **Implikasi Ketiga**, hasil sebuah inovasi mungkin juga untuk mengatasi masalah yang dihadapi warga dan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka (Korteland & Bekkers, 2008). **Implikasi Keempat**, nilai publik dari suatu inovasi juga dapat bergantung kelayakannya secara hukum (Korteland dan Bekkers, 2008).

Jika kita menggunakan teori inovasi modern, maka inovasi implementasi menekankan pelaksanaannya secara terbuka. Inovasi bukanlah sesuatu yang dapat dikaitkan dengan kapasitas dan kemampuan seseorang, atau proses penelitian dan pengembangan sistematis yang dilembagakan di laboratorium atau lembaga Litbang. Studi tentang praktik inovasi menunjukkan bahwa prosesnya membutuhkan kemampuan dan kemauan aktor

untuk bekerjasama, menghubungkan dan berbagi ide, pengetahuan maupun pengalaman di luar batas organisasi tradisional, serta bertukar sumberdaya penting. Ini mengacu pada pertukaran pengetahuan, informasi dan pengalaman yang agak bebas dan interaktif, di mana ide-ide dan konsep-konsep baru dibahas di dalam jaringan intra dan antar organisasi (Bekker et al., 2013).

Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian

Untuk menjalankan inovasi yang digerakkan oleh kebutuhan masyarakat atau target sasaran/terpilih, penting bahwa pemanfaat hasil inovasi serta pemangku kepentingan, target sasaran terkait berpartisipasi dalam pengembangan, implementasi, dan adopsi inovasi (Lee, & Jin, 2014). Itulah sebabnya inovasi kadangkala dipandang sebagai hasil dari proses penciptaan bersama secara terbuka (Bason, 2010), yang sangat sering terjadi dalam “jaringan inovasi kolaboratif” (Bekkers et al., 2011). Stakeholder, target sasaran/terpilih yang relevan membawa pengetahuan, informasi, pengalaman dan sumberdaya mereka, sehingga mereka dapat membagikan untuk mewujudkan hasil inovatif yang relevan bagi mereka. Proses itu sebagai sirkulasi berbasis kepercayaan dan pemupukan silang ide-ide baru yang kreatif melintasi batas-batas organisasi, sektor dan disiplin, serta sikap positif terhadap pengambilan risiko dalam lingkungan sosial-politik maupun pembentukan kepemilikan dan tanggung jawab bersama (Bekkers et al., 2011)). Selain itu, dalam pelaksanaannya diperlukan budaya kerja terbuka dan aman, yang mana “trial and error”, refleksi dan pembelajaran dapat dilakukan tanpa ada yang dihukum karena membuat “kesalahan” akibat tidak menyadari adanya hasil langsung dari proses itu.

PENUTUP

Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian

Perbincangan yang telah dituang dalam paper orasi ilmiah sederhana ini memperlihatkan pada kita, bahwa ada mainstream dan kontinum konsepsional yang dapat dikemukakan. Perkembangan paradigma administrasi publik sebagai induk, demokratisasi dan teknologi (inovasi) merupakan alasan utama mengapa arah dan studi kebijakan harus direvitalisasi. Kecenderungan untuk menggeser lokus implementasi pada tataran publik yang lebih luas adalah sebagai realitas, yang memerlukan sebuah konser sosial yang didalamnya terdiri dari resorasis, networking. Peran kapital sosial menempati posisi yang signifikan dalam horizon perubahan studi implementasi. Kapital sosial dan governance membangun sebuah hubungan "mutual exclusive", tidak boleh saling meniadakan. Kapital sosial membekali deposit citra governance sehingga lebih bercorak genuine, sedangkan governance memberikan karakter bahwa kapital sosial dapat berfungsi dan bersinergi untuk mencapai kemaslahatan publik. Dalam proses demokratisasi, peran kapital sosial ini makin penting, bukan sekedar menyediakan nilai dan sistem norma bagaimana governance implementasi akan berdinamika, tetapi juga akan menentukan kearah mana sebuah citra masyarakat madani akan berderak. Nilai-nilai dan sistem sosial yang terkumpul dalam kapital sosial masyarakat, target sasaran/terpilih selama ini perannya telah banyak digantikan oleh pranata-pranata modernisasi yang ternyata hanya memberikan *integritas semu*.

Inovasi memperkuat konfigurasi kapital sosial dan governance dengan merubah permainan implementasi, diantaranya dengan merubah land scape tentang bagaimana organisasi implementer di rancang, relasi hubungan antar actor dan organisasi, posisi kelompok sasaran sampai derajat keterbukaan dan tentunya masih banyak yang lainnya.

Tentunya kami berharap semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. **Wabillahit taufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Referensi

- Bekkers, V., Edelenbos J. And Steijn B. (2011). Linking Innovation to the Public Sector: Contexts, Concepts and Challenges, in: Bekkers, V., J. Edelenbos & B. Steijn (eds.), *Innovation in the public sector: linking capacity and leadership*. 3-32. Houndsmills: Palgrave McMillan
- Brown, M. E., & Livermore, M. (2019). Identifying individual social capital profiles in low-resource communities: Using cluster analysis to enhance community engagement. *Journal of the Society for Social Work and Research*, 10(4), 477–500. <https://doi.org/10.1086/706193>
- Bekkers, et al., (2013). *Social Innovation in the Public Sector: An integrative framework*. LIPSE Working papers (no. 1). Rotterdam: Erasmus University Rotterdam
- Bekkers, V. (2012). Why does e-government looks as it looks? Looking beyond the explanatory emptiness of the e-government concept. *Information Polity*, 17(3-4); 329-342
- Bason, C. (2010). *Leading public sector innovation*. Bristol: Policy Press
- Denhard, R,B and Denhard,J.V. (2003). *The New Public Service: Serving Not Streering*. ME Sharpe.Inc.New York.
- Duadji N., Tresiana N. (2020). *Lensa Kapital Sosial dan Reposisi Administrasi Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Frederickson, H. G. (1997). *The Spirit of Public Administration*. Jossey-Bass Publishers, San Francisco
- Frederickson, H. G. (2000). *The Repositioning of American Public Administration*, American Political Science Association, available at APSANET 18p
- Fukuyama, F. (1999). *Social Capital and Civil Society*, Paper for delivery at the IMF Conference on Second Generations Reforms, The Institute of Public Policy, George Mason University. Available at <http://www.imf.com>. 21 p.
- Fukuyama, F. (1999). *The Great Disruption : Human nature and the Reconstitution of Social Order*, Free Press Paperback Book, Simon and Schuster, New York
- Fukuyama, F. (1996). *Trust : The Social Virtues and The Creation of Prosperity*, Free Press Paperback Book, Simon and Schuster, New York
- Goggin, M.L. et al. (1990) *Implementation, Theory and Practice*, Scott, Foresmann and Company, USA
- Howlett, M. (2018). The criteria for effective policy design: character and context in policy instrument choice. *Journal of Asian Public Policy*, 11(3), 245–266. <https://doi.org/10.1080/17516234.2017.1412284>
- Hupe, P., Hill, M., & Nangia, M. (2014). Studying implementation beyond deficit analysis: The top-down view reconsidered. *Public Policy and Administration*, 29(2), 145–163. <https://doi.org/10.1177/0952076713517520>
- Jiménez-Aceituno, A., Peterson, G. D., Norström, A. V., Wong, G. Y., & Downing, A. S. (2020). Local lens for SDG implementation: lessons from bottom-up approaches in Africa. *Sustainability Science*, 15(3), 729–743. <https://doi.org/10.1007/s11625-019-00746-0>
- Korteland, E. & Bekkers V. (2008). Diffusion and adoption of electronic service delivery innovations in Dutch e-policing. *Public Management Review*. 10(1); 71-88.
- Knack, S. (2000). *Social Capital and the Quality of Government : Evidence from the U.S. States*, World Bank Paper, available at <http://www1.worldbank.org/publicsector/>
- Lee, Y. H., & Jin, D. Y. (2014). Technology and citizens: An analysis of citizens' jury on the Korean

- National Pandemic response system. *Javnost*, 21(3), 23–38. <https://doi.org/10.1080/13183222.2014.11073409>
- Lester, J. P. (1988). Superfund Implementation : Exploring Environmental Gridlock Independent Variables Inducements and Cinsraia Intervening Variables Dependent Variables. *Science*
- Levi, M.(1999). *When Good Defenses Make Good Neighbors : A Transaction Cost Approach to Trust and Distrust*, Paper originally prepared for presentation at the 2nd Annual Meeting of the International Society for the New Institutional Economic (ISNIE), Paris September, 17-19, 1998 and at the Conference on Social Networks and Social capital, Duke University, October 30 November 1, 1998. Revised at January, 1999, Published by Department of Political Science,, University of Washington
- March J. G. and Olsen J. P.(1998). The Institutional Dynamics of International Political Orders. *International Organization*, Vol.52,No.4, 943-969. DOI <https://www.jstor.org/stable/2601363>
- Matland, R.E. (1995) Synthesizing The Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation, in: *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5(2), p. 145-174.
- Moyson S at al. (2017). Policy learning and policy change: theorizing their relations from different perspectives. *Policy and Society*. Vol 36 (2). 161-177. <https://doi.org/10.1080/14494035.2017.1331879>
- O'Toole,LJ. (2000). Research on Policy Implementation: Assesment and Prospects. *Journal of Public Administration Research and Theory*. 20, 263-288
- Purwanto, E.A dan Sulistyastuti, D.R (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Penerbit Gaya Media. Yogyakarta
- Pierre, J and Peters B. G. (2000). *Governance, Politics and The State*. Macmillan Press Ltd, London
- Ripley, R B. and Grace A. F (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, The Dorsey Press, Chicago-Illionis.
- R La Porta R La et al., (1999). The Quality of Government. *The Journal of Law, Economics, and Organization*, Volume 15, Issue 1, 222–279, <https://doi.org/10.1093/jleo/15.1.222>
- Seligman, A. B. (1998). *Between Public and Private : Towards a Sociology of Civil Society* dalam Robert W. Hefner (eds), 1998, *Democratic Civility : The History and Cross-Cultural Possibility of a Modern Political Ideal*, Transaction Publishers, New Brunswick (USA).
- Stanica, V.I., & Olaru, I.G. (2017). Local Development In Some Romanian Rural Communities With Strong Social Capital . The Advantages And Disadvantages Of Social Capital In Community Development. *Journal of Public Administration, Finance and Law*, (12), 86–96.
- Sabatier, P. (1986) “Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research” *Journal of Public Policy* 6, (Jan), h. 21-48.
- Stocker , R.P. Reluctant . (1991). *Partners: Implementing Federal Policy*. University of Pittsburgh
- Scheberle, D.L. (2004). *Federalism and Environmental Policy: Trust and The Politics of Policy Implementation*, Second Edition. Georgetown University Press. Washington D.C
- Torenvlied, R dan Thomson, R., (2003). *Is Implementation Distinct from Political Bargaining? A Micro Level Test*. *Rationality and Society*. 15 (1) 65-84. London: Sage Publication

A. DATA DIRI

Nama Lengkap	DR. Noverman Duadji
NIP	
NIND	00031169
Jabatan Akademik	Lektor Kepala
Pangkat dan Golongan	IV B
Tempat&Tanggal Lahir	Sumatera Selatan, 03 November 1969
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Bidang Keahlian	Kebijakan Publik
Nomor Telp/HP	081379646665
Alamat Email	Noverman.duadji@fisip.unila.ac.id
Agama	Islam
Asal Perguruan Tinggi	Universitas Lampung
	Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
	Jurusan/Departemen : Administrasi Negara/Publik
Pendidikan	S3 (Doktoral) Administrasi Publik Universitas Padjajaran
S2	S2 (Magister) Administrasi Publik Universitas Brawijaya
	S1 (Sarjana) Administrasi Negara STIA- LAN Malang
Link Scopus	https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222520691
Link Sinta	https://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=5975286&view=overview
Link Google Scholar	https://scholar.google.co.id/citations?user=bRZvtEAAAAAJ&hl=en
Link ORCID	https://orcid.org/0000-0002-1459-8045

BUKU-BUKU

NO	TAHUN	JENIS BUKU	JUDUL/PENULIS/ PENERBIT	LINK
1	2020	Buku Referensi	Lensa Kapital Sosial dan Reposisi Administrasi Publik Penerbit Graha Ilmu Yogyakarta ISBN 978-623-228-688-7	http://grahailmu.id/product/lensa-kapital-sosial-dan-reposisi-administrasi-publik-membangun-bridging-social-capital-perindungan-dan-pemenuhan-hak-anak-melalui-desa-ramah-anak/
2	2019	Buku Ajar	Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Penerbit Graha Ilmu Yogyakarta ISBN 978-623-228-091-5	http://grahailmu.id/product/implementasi-dan-evaluasi-kebijakan-publik/
		Buku Referensi	Gender Equality dan Inovasi Kebijakan Publik Penerbit Graha Ilmu Yogyakarta ISBN 978-623-228-013-7	http://grahailmu.id/product/gender-equality-dan-inovasi-kebijakan-publik-sebuah-model-inovasi-kebijakan-perintisan-klaster-dalam-pengembangan-industri-rumahan-perempuan/
3	2018	Buku Referensi	Tata Kelola Pariwisata Teluk Kiluan Berkelanjutan Penerbit Graha Ilmu Yogyakarta ISBN 978-602-262-513-1	http://grahailmu.id/product/tata-kelola-pariwisata-teluk-kiluan-berkelanjutan/
4	2017	Monograf	Kota Layak Anak Berkelanjutan Penerbit Aura Press Bandar Lampung ISBN 978-602-6739-64-3	http://repository.lppm.unila.ac.id/5850/ https://aura-publishing.com/
		Book Chapter	Anak, Perempuan, dan Sustainable Development Goals (SDGs) Penerbit Suluh Media Yogyakarta, ISBN 978-602-8610-43-8	http://grahailmu.id/product/anak-perempuan-dan-sustainable-development-goals-sdgs/
		Buku Ajar	Kebijakan Publik: Teori dan Praktek Model-Model Pengelolaan Pembangunan Daerah Penerbit Suluh Media Yogyakarta, ISBN 978-602-8610-39-1	http://repository.lppm.unila.ac.id/10655/

		Buku Ajar	Kebijakan Publik Penerbit Aura Press Bandar Lampung ISBN 978-602-6565-46-4	https://aura-publishing.com/
		Buku Ajar	Pengantar Ilmu Administrasi Publik Penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta, ISBN 978-602-6835-38-3	-

PUBLIKASI INTERNASIONAL DAN NASIONAL

N O	KLASIFIKASI	TAHUN	PUBLIKASI
1	Jurnal Internasional Pereputasi	2021	Penulis : Febryano, I. G. ; Harum, O. M. A. ; Wulandari, C. ; Hidayat, W. ; Banuwa, I. S. ; Prasetya, H. ; Iswandaru, D. ; Novriyanti, N. ; Duadji, N. ; Tresiana, N. ; Zulfiani, D. ; Ichsan, A. C. ; Salampessy, M. L. Judul Artikel : <i>Raw material of Besemah traditional house construction in Indonesia,</i> Jurnal : Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry Volume : 63 (1). pp. 74-80. Penerbit : Wydawaictwo Naukowe PWN Quartil/SJR : Q4/0,19 H Indeks : 10 Link Jurnal : https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20210104202 Link Repository : http://repository.lppm.unila.ac.id/30229/ Link Google Scholar : https://scholar.google.co.id/citations?user=fdiHUf4AAAAJ&hl=en
2	Prosiding Internasional Bereputasi	2021	Penulis : Novita Tresiana dan Noverman Duadji Judul Artikel : <i>Environment and polemic of cantrang ban in Lampung bay: The importance of stakeholder mapping.</i> Jurnal : <i>Earth and Environmental Science (EES)</i> Volume : 739 Penerbit : IOP Publishing Ltd Quartil/SJR :- H Indeks :- Link Jurnal : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/739/1/012027

			Link Repository : http://repository.lppm.unila.ac.id/30232/ Link Google Scholar : https://scholar.google.co.id/citations?user=fdiHUf4AAAAJ&hl=en
		2021	Penulis : Noverman Duadji dan Novita Tresiana Judul Artikel : <i>Cantrang and environment protection: Policy analysis of handling the risk of implementation of the Ban in Lampung Bay</i> Jurnal : <i>Earth and Environmental Science (EES)</i> Volume : 739 Penerbit : IOP Publishing Ltd Quartil/SJR : - H Indeks : - Link Jurnal : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/739/1/012033 Link Repository : http://repository.lppm.unila.ac.id/30231/ Link Google Scholar : https://scholar.google.co.id/citations?user=fdiHUf4AAAAJ&hl=en
3	Jurnal Internasional	2020	Penulis : Noverman Duadji dan Novita Tresiana Judul Artikel : <i>Sustainable Tourism: Why Do Government Need Collaborative Governance</i> Jurnal : <i>Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences</i> Volume : 11 (107). pp. 177-182 Penerbit : Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences Quartil/SJR : - H Indeks : - Link Jurnal : https://rjoas.com/issue-2020-11/article_21.pdf Link Repository : http://repository.lppm.unila.ac.id/26800/ Link Google Scholar : https://scholar.google.co.id/citations?user=fdiHUf4AAAAJ&hl=en
4	Prosiding Internasional (Atlantis Press)	2021	Penulis : Novita Tresiana dan Noverman Duadji Judul Artikel : <i>Policy Cluster: Affirmative Empowerment and Strengthening of Coastal Community Women Home Industries</i> Jurnal : <i>Advances in Engineering Research</i> Volume : 202 Penerbit : Atlantis Press

			Quartil/SJR : - H Indeks : - Link Jurnal : https://www.atlantis-press.com/proceedings/icsb-19/125957455 Link Repository : - Link Google Scholar : https://scholar.google.co.id/citations?user=fdiHUf4AAAAJ&hl=en
		2021	Penulis : Noverman Duadji dan Novita Tresiana Judul Artikel : <i>Identification of Child Problems & Tracking Policies for the Protection and Fulfillment of Children's Basic Rights in South Regency as a Coastal Zone of Lampung Province</i> Jurnal : Advances in Engineering Research Volume : 202 Penerbit : Atlantis Press Quartil/SJR : - H Indeks : - Link Jurnal : https://www.atlantis-press.com/proceedings/icsb-19/125957468 Link Repository :- Link Google Scholar : https://scholar.google.co.id/citations?user=fdiHUf4AAAAJ&hl=en
5	Jurnal Terakreditasi Nasional (Sinta 2)	2019	Penulis : Novita Tresiana dan Noverman Duadji Judul Artikel : <i>Mewujudkan Gender Equality Melalui Pengembangan Industri Rumahang Perempuan</i> Jurnal : Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam Volume : 18, No. 2 Penerbit : PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sinta : SINTA 2 Link Jurnal : http://www.journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/2201/1823 Link Repository : http://repository.lppm.unila.ac.id/22477/ Link Google Scholar : https://scholar.google.co.id/citations?user=fdiHUf4AAAAJ&hl=en
		2018	Penulis : Noverman Duadji, Novita Tresiana dan Rahmah Dianti Putri Judul Artikel : <i>Acceleration Model of Child-Friendly City/District in Lampung Province</i> Jurnal : Jurnal Bina Praja ISSN 2085-4323 Volume : Volume 10 (1) (2018): 147-157, Penerbit : Research&Development Agency Ministry of Home Affairs Republic Of Indonesia

			Sinta : SINTA 2 Link Jurnal : http://binaprajajournal.com/ojs/index.php/jbp/article/view/365/255 Link Repository : http://repository.lppm.unila.ac.id/10594/ Link Google Scholar : https://scholar.google.co.id/citations?user=fdiHUf4AAAAJ&hl=en
		2018	Penulis : Noverman Duadji dan Novita Tresiana Judul Artikel : <i>A Participation model based on community forum as reproduktive health knowledge transaction space to indrease male participation in vasectomy</i> Jurnal : Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Unair, ISSN 2086-7050, Volume 31 Nomor 1, Maret 2018, 1-13/ 13 (tiga belas) Penerbit : Airlangga University Press Sinta : SINTA 2 Link Jurnal : https://ejournal.unair.ac.id/MKP/article/view/2767/4682 Link Repository : http://repository.lppm.unila.ac.id/13939/ Link Google Scholar : https://scholar.google.co.id/citations?user=fdiHUf4AAAAJ&hl=en
		2018	Penulis : Novita Tresiana dan Noverman Duadji Judul Artikel : <i>Social Entrepreneur Model for Tourism Development in Kiluan Bay</i> Jurnal : Jurnal Sosial dan Pembangunan ISSN 0215-8175 Volume : 34 Nomor 1 Tahun 2018, Hal 83-92 Penerbit : Pusat Penerbitan Universitas (P2U-LPPM), Sinta : SINTA 2 Link Jurnal : https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/3141/pdf Link Repository : http://repository.lppm.unila.ac.id/10595/ Link Google Scholar : https://scholar.google.co.id/citations?user=fdiHUf4AAAAJ&hl=en
		2018	Penulis : Noverman Duadji dan Novita Tresiana Judul Artikel : <i>Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance</i> Jurnal : Jurnal Sawwa: Jurnal Studi gender , ISSN: 02158175 Volume : 13, No. 1 (2018): 1-22

			Penerbit : Penerbit Pusat Studi Gender dan Anak LP2M, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang Sinta : SINTA 2 Link Jurnal : http:// www.journal.walisongo.ac.id /index.php/ sawwa/ article/ view/ 2201/1823 Link Repository : http://repository.lppm.unila.ac.id/10616/ Link Google Scholar : https://scholar.google.co.id/citations?user=fdiHUf4AAAAJ&hl=en
		2016	Penulis : DR. Novita Tresiana M.S.i dan DR. Noverman Duadji,M.Si Judul Artikel : <i>Multi Stakeholders Governance Body Model in Achieving The Excellence Public Policy</i> Jurnal : Jurnal Sosial dan Pembangunan ISSN 0215-8175 Volume : Vol. 32, No. 2 (Desember 2016) Penerbit : Pusat Penerbitan Universitas (P2U-LPPM) Unisba Sinta : SINTA 2 Link Jurnal : http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1879/pdf Link Repository : http://repository.lppm.unila.ac.id/2705/ Link Google Scholar : https://scholar.google.co.id/citations?user=fdiHUf4AAAAJ&hl=en
		2016	Penulis : DR. Novita Tresiana M.S.i dan DR. Noverman Duadji,M.Si Judul Artikel : <i>Kegagalan Pemaknaan Lembaga Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa dalam mewujudkan Deepening Democracy</i> Jurnal : Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Unair, ISSN 2086-7050, Volume : Vol. 29,No.4, Oktober-Desember 2016 Penerbit : Penerbit Airlangga University Press Sinta : Sinta 2 Link Jurnal : https://ejournal.unair.ac.id/MKP/article/view/2752/2300 Link Repository : http://repository.lppm.unila.ac.id/2706/ Link Google Scholar : https://scholar.google.co.id/citations?user=fdiHUf4AAAAJ&hl=en

HAKI-HAKI

TAHUN	HAKI
2021	Ciptaan: Buku Pedoman Merancang Pekon Ramah Anak (PRA) (Karya Tulis) Pencipta: Dr Noverman Duadji dan Dr. Novita Tresiana No dan Tanggal Permohonan: EC00202121899, 29 April 2021 No Pencatatan: 000248641
	Ciptaan: KAJIAN AKADEMIS PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (Buku) Pencipta: Dr. Novita Tresiana dan Dr Noverman Duadji No dan Tanggal Permohonan: EC00202121900, 29 April 2021 No Pencatatan: 000248640
2020	Ciptaan: KAJIAN AKADEMIS RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN WIRAUSAHA PEREMPUAN DAN PERKUATAN INDUSTRI RUMAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (Karya Tulis) Pencipta: Dr. Novita Tresiana dan Dr Noverman Duadji No dan Tanggal Permohonan: EC00202012478, 13 April 2020 No Pencatatan: 000185007
2018	Ciptaan: New Public Service Dan Musrenbang Desa (Buku) Pencipta: Dr. Novita Tresiana No dan Tanggal Permohonan: EC00201857463, 5 Desember 2018 No Pencatatan: 000126925
2018	Ciptaan: Tata Kelola Pariwisata Teluk Kiluan Berkelanjutan (Buku) Pencipta: Dr. Novita Tresiana dan Dr Noverman Duadji No dan Tanggal Permohonan: EC00201857466, 5 Desember 2018 No Pencatatan: 000126927
2018	Ciptaan: Rasionalitas dan Pembuatan Keputusan Kebijakan (Buku) Pencipta: Dr. Novita Tresiana No dan Tanggal Permohonan: EC00201813166, 21 Mei 2018 No Pencatatan: 000108624
2018	Ciptaan: Pengantar Ilmu Administrasi (Buku) Pencipta: Dr. Novita Tresiana dan Dr Noverman Duadji No dan Tanggal Permohonan: EC00201857465, 5 Desember 2018 No Pencatatan: 000126926
2018	Ciptaan: Penelitian Kualitatif (Buku) Pencipta: Dr. Novita Tresiana No dan Tanggal Permohonan: EC00201857464, 5 Desember 2018 No Pencatatan: 000126932
2018	Ciptaan: Kota Layak Anak Berkelanjutan (Buku) Pencipta: Dr Noverman Duadji dan Dr. Novita Tresiana No dan Tanggal Permohonan: EC00201813185 21 Mei 2018 No Pencatatan: 000108625
2018	Ciptaan: Kebijakan Publik: Teori Dan Praktek Model-Model Pengelolaan Pembangunan Daerah (Buku)

	Pencipta: Dr. Novita Tresiana dan Dr Noverman Duadji No dan Tanggal Permohonan: EC00201857462, 5 Desember 2018 No Pencatatan: 000126924
--	--

KARYA ILMIAH DISAJIKAN DALAM FORUM

NO	KLASIFIKASI	TAHUN	PUBLIKASI
1	Konferensi Internasional	2020	Nama Konferensi : The 1st Universitas Lampung International Conference on Science, Technology and Environment 2020 Tempat/Tanggal : Lampung/18-19 November 2020 Judul Makalah: Environment and polemic of cantrang ban in Lampung bay: The importance of stakeholder mapping Publish Prosiding : IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 739 (2021) 012027 Link : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/739/1/012027
		2020	Nama Konferensi : The 1st Universitas Lampung International Conference on Science, Technology and Environment 2020 Tempat/Tanggal : Lampung/18-19 November 2020 Judul Makalah: Cantrang and environment protection: Policy analysis of handling the risk of implementation of the Ban in Lampung Bay Publish Prosiding : IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 739 (2021) 012027 Link : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/739/1/012033
		2019	Nama Konferensi : International Conference on Sustainable Biomass (ICSB 2019) Tempat/Tanggal : Lampung/23-24 Agustus 2019 Judul Makalah: Policy Cluster: Affirmative Empowerment and Strengthening of Coastal Community Women Home Industries Publish Prosiding : Series:Advances in Engineering Research Proceedings of the International Conference on Sustainable Biomass (ICSB 2019) Link : https://www.atlantispress.com/proceedings/icsb-19/125957455

		2019	Nama Konferensi : International Conference on Sustainable Biomass (ICSB 2019) Tempat/Tanggal : Lampung/23-24 Agustus 2019 Judul Makalah: Identification of Child Problems & Tracking Policies for the Protection and Fulfillment of Children's Basic Rights in South Regency as a Coastal Zone of Lampung Province Publish Prosiding : Series:Advances in Engineering Research Proceedings of the International Conference on Sustainable Biomass (ICSB 2019) Link : https://www.atlantispress.com/proceedings/icsb-19/125957468
2	Seminar Nasional	2020	Nama Konferensi : Seminar Nasional FISIP ;Agenda Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Local Knowledge" Tempat/Tanggal : Lampung, 08 Agustus 2019 Judul Makalah: Pemetaan Perempuan Berbasis Rumah: Promosi Kerja Layak Publish Prosiding : - Link : -
		2019	Nama Konferensi : Seminar Nasional "Berbagai Perspektif Sosial Humaniora di Era New Normal" Tempat/Tanggal : Silawesi Tenggara/30 November 2020 Judul Makalah: Sosial Humaniora dan Penulisan Karya Ilmiah Buku Referensi Publish Prosiding : - Link : -

PENELITIAN-PENELITIAN

NO	KLASIFIKASI	TAHUN	PENGALAMAN
1	Nasional	2019-2020	1. Penerima Penelitian Nasional Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2019-2020, Berjudul "<i>Model Klaster Pengembangan Industri Rumah dalam mewujudkan Gender Equality Perempuan di Kabupaten Lampung Selatan</i>" Sumber Dana: Ristekdikti Link : https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/

			2. Penerima Penelitian Nasional Skema Penelitian Dasar Tahun 2019-2020, Berjudul “<i>Membangun Pekon Ramah Anak Berbasis Demokrasi Deliberatif : (Menggagas Sound Governance Body dan Citizenship Education dalam Musrenbangdes)</i>” Sumber Dana: Ristekdikti Link : https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/
		2018	1. Penerima Penelitian Nasional Skema Penelitian Strategis Nasional Institusi Tahun 2018, Berjudul “<i>Model Pengembangan Pengelolaan Pariwisata Berbasis Komunitas (Studi di Wilayah Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus)</i>” Sumber Dana: Ristekdikti Link : https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/
		2017	1. Penerima Penelitian Nasional Skema Penelitian Produk Terapan Tahun 2017, Berjudul “<i>Model Pengembangan Pengelolaan Pariwisata Berbasis Komunitas (Studi di Wilayah Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus)</i>” Sumber Dana: Ristekdikti Link : https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/
		2016	1. Penerima Penelitian Nasional Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2015-2016, Berjudul “<i>KEGAGALAN PEMERINTAH LOKAL DALAM PEMBANGUNAN ERA OTONOMI DAERAH: (Kebijakan Deliberatif: menggagas multistakeholder governance body dalam musrenbang desa untuk mewujudkan kebijakan/program pembangunan yang unggul di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung)</i>” Sumber Dana: Ristekdikti Link : https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/ 2. Penerima Penelitian Nasional Skema Penelitian Strategis Nasional Institusi, Tahun 2015-2016, Berjudul “<i>PUBLIC SERVICE DELIVERY MODEL (Pemetaan Organisasi Grassroots dan Pembentukan Governance Sounds Berbasis Lembaga Adat Untuk Menciptakan Ruang dan Peningkatan Partisipasi Publik Di Provinsi Lampung)</i>” Sumber Dana: Ristekdikti Link : https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/
			3. Menulis Bookchapter Kolaborasi dengan Peneliti Gender dan Anak Perguruan Tinggi di Indonesia , Berjudul “<i>Matra SDGs dalam Penghapusan kekerasan, Trafficking dan Pemberdayaan Ekonomi</i>” Link : -

2	Daerah	2021	1. Survei dan Pengukuran Indeks Kepuasan Pelayanan Bekerjasama Dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Pringsewu Sumber Dana: Kabupaten Pringsewu
3	Nasional& Daerah	2016-2019	1. Survei dan Penyusunan Profil Gender Tahun 2019, <i>Bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Lampung</i> 2. Survei dan Penyusunan Profil Gender dan Anak Tahun 2019, <i>Bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Timur</i> 3. Survei dan Penyusunan Profil Gender dan Anak Propinsi Lampung Tahun 2018, <i>Bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Lampung.</i> 4. Pemetaan Industri Rumah Tangga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017-2018, <i>Bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA RI) dan Kabupaten Lampung Timur</i> 5. Survei dan Penyusunan Profil Gender dan Anak Propinsi Lampung Tahun 2017, <i>Bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Lampung.</i> 6. Pemetaan Industri Rumah Tangga Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 <i>Bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Kabupaten Lampung Selatan</i>

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JENIS	KARYA PENGABDIAN
Karya pengabdian masyarakat yang berdampak penting dalam memecahkan masalah di masyarakat	1. MODEL PENGEMBANGAN KEMITRAAN: PKM Online Kerjasama Antar Lembaga (Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara STIMIK LAN Bandung-Administrasi Negara-Magister Ilmu Administrasi) 2. MODEL PEMBERDAYAAN : Membentuk Pekon Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan
Keterlibatan dalam perumusan kebijakan publik yang sudah diimplementasikan	1. Penyusunan Naskah Akademis Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lampung Tengah

	2. Penyusunan Naskah Akademis Pembentukan Unit Pelaksana Tehnis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) Kota Bandar Lampung
Pengalaman lain dalam pengabdian kepada masyarakat	1. Pendampingan Pemberdayaan Ekonomi dan sosial Masyarakat di 3 Desa yaitu Desa Canti dan Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, dan Desa Labuhan Ratu 7 Kabupaten Lampung Timur 2. Tahun 2020-2021: Tim Kurikulum Fisip Unila 3. Tahun 2019-Sekarang : Anggota Asosiasi Ilmu Administrasi Negara/Publik (Indonesian Association of Public Administration/IAPA) 4. Membentuk Community Watch Tindak Pidana Pencegahan dan Perdagangan Orang (TPPO) : Deklarasi dan Sosialisasi pembentukan Komunitas Peduli (Community Watch) TPPO 5 Desa di Kabupaten Lampung Selatan, Kementrian PPPA RI- Unila, Unila, 28-29 Desember 2018 5. Tahun 2016-Sekarang : Anggota Asosiasi Pusat Studi Gender/Anak Indonesia (ASWGI)